

**INKLUSI KEUANGAN BAGI PEREMPUAN : ANALISIS LITERASI DAN
AKSESIBILITAS BAGI PELAKU USAHA KECIL
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Yuda Isvanda Pasaribu

NPM : 1705180001

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

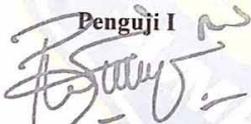
Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : YUDA ISVANDA PASARIBU
NPM : 1705180001
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : INKLUSI KEUANGAN BAGI PEREMPUAN: ANALISIS LITERASI DAN AKSESIBILITAS BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si)

Penguji II

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Pembimbing


(ERI YANTI NASUTION, SE., M.Ec)

Panitia Ujian

Ketua


(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris


(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : YUDA ISVANDA PASARIBU
N P M : 1705180001
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Judul Skripsi : INKLUSI KEUANGAN BAGI PEREMPUAN :
ANALISIS LITERASI DAN AKSESIBILITAS
BAGI PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, 21 Februari 2023

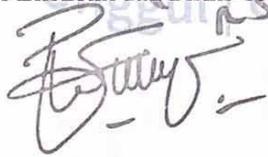
Pembimbing Skripsi



(ERI YANTI NASUTION, S.E., M.Ec.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS,S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. KURNI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YUDA ISVANDA PASARIBU
N.P.M : 1705180001
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : INKLUSI KEUANGAN BAGI PEREMPUAN: ANALISIS LITERASI
DAN AKSESIBILITAS BAGI PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/01/2023	Hasil dari data yang diperoleh di deskripsikan menggunakan diagram atau piramida	P	
05/02/2023	Pembahasan dibuat dengan narasi dari hasil pengolahan data serta mantapkan penelitian terdahulu ataupun teori yg mendukung hasil penelitian	P	
15/02/2023	Acc Sidang Meja Hijau	P	

Pembimbing Skripsi

ERI YANTI NASUTION, S.E., M.Ec

Medan, 16 Februari 2023
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuda Isvanda Pasaribu
N P M : 1705180001
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Inklusi Keuangan Bagi Perempuan : Analisis Literasi dan Aksesibilitas Bagi Pelaku UMKM di Kota Medan.” Adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



YUDA ISVANDA PASARIBU

ABSTRAK

Indeks inklusi keuangan perempuan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan laki-laki. Indeks inklusi keuangan perempuan di Indonesia sebesar 75,15%, lebih kecil dari indeks inklusi keuangan laki-laki Indonesia yang sebesar 77,24%. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk menganalisis tingkat literasi tentang keuangan bagi pelaku usaha kecil perempuan di kota Medan dan untuk menganalisis apakah pelaku usaha perempuan mengakses produk keuangan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kualitatif yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2013). Data yang dihimpun meliputi wilayah kota Medan. Hasil penelitian ini adalah tingkat literasi dan aksesibilitas UMKM perempuan di kota Medan dalam kategori baik.

Kata kunci : inklusi keuangan, umkm, literasi keuangan.

ABSTRACT

The Indonesian women's financial inclusion index is still lower than the male financial inclusion index. The women's financial inclusion index in Indonesia is 75.15%, lower than the Indonesian men's financial inclusion index of 77.24%. The purpose of this study is to analyze the level of financial literacy for women small business actors in the city of Medan and to analyze whether women business actors access financial products.

The research uses a qualitative approach, namely data in the form of verbal sentences and qualitative data that cannot be measured on a numerical scale (Kuncoro, 2013). The data collected covers the area of the city of Medan. The results of this study are the level of literacy and accessibility of women's MSMEs in the city of Medan in the good category.

Keywords: financial inclusion, umkm, financial literacy.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Inklusi Keuangan Bagi Perempuan : Analisis Literasi dan Aksesibilitas Bagi Pelaku Umkm Di Kota Medan”**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak *Assoc. Prof. Dr. Agussani M.AP*, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Januri, S.E, MM, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak *Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., MSi.*, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S, selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Roswita Hafni, S.E, Msi, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Eri yanti Nasution ,S.E, M.E.c., sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dengan penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan diakhirat kelak.
8. Bpak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik.
9. Ayahanda dan ibunda penulis yaitu bapak Ishak Pasaribu dan ibu Asmalia Br Parapat sebagai sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dan juga adik-asik penulis yaitu Silva Ishari Pasaribu, Nurhalimah Pasaribu, Naya Ashari Pasaribu. Terimakasih atas semua do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi.

Semoga suatu saat penulis dapat membalas kebaikan yang diberikan dan dapat dibanggakan keluarga.

10. Calon istri penulis yaitu Khatimatul Husna S.pd. yang senantiasa mendukung dan memberi semangat penulis dalam proses membuat penelitian ini.
11. Sahabat Saya sekaligus teman seperjuangan Aspan Anshori Siregar, Rahman Sofyan Manalu, dan Muhammad Rivai Terimakasih untuk motivasi, menemani membantu dan memberi segala masukan serta selalu ada dalam memberi support kepada penulis, selalu menghilangkan kepenatan penulis dalam pembuatan skripsi ini
12. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.
13. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapakan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. Terima Kasih.

Medan, 21 Februari 2023

Penulis

Yuda Isvanda Pasaribu

Daftar Isi

	Halaman
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	x
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	11
1.3.1 Batasan masalah.....	11
1.3.2 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Tujuan Penelitian	12
1.4.2 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kajian Teoritis	14
2.1.1 Teori uang.....	14
2.1.2 Teori Konsumsi Keynes.....	20
2.1.3 Inklusi Keuangan	22
2.1.4 Teori Perbankan.....	28
2.1.5 Literasi Keuangan	31
2.1.6 Aksesibilitas keuangan	35
2.1.7 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	37
2.1.8 Lembaga Keuangan	41
2.2 Penelitian Terdahulu.....	44
2.3 Kerangka Konseptual	47

BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Definisi Populasi	48
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Populasi dan Sampel	53
3.7 Teknik Analisis Data	54
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Kota Medan.....	56
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	59
4.2.2 Hasil.....	59
4.2.3 Pembahasan	67
BAB V.....	71
KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.....	4
Tabel 1. 2 Posisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (juta rupiah) Tahun 2015-2019	6
Tabel 1. 3 Data Rekapitulasi Jumlah UMKM Kota Medan Tahun 2018.....	10
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan	44
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	49
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Medan	57

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4. 1 Responden berdasarkan usia.....	60
Gambar 4. 2 Responden berdasarkan strata pendidikan	60
Gambar 4. 3 Responden yang membutuhkan modal usaha tambahan	61
Gambar 4. 4 Jumlah responden yang memahami produk keuangan dari bank dan non bank.....	62
Gambar 4. 5 Responden yang memahami alur administrasi pinjaman modal	62
Gambar 4. 6 Responden yang memahami alur administrasi pinjaman modal dari non bank	63
Gambar 4. 7 Responden memahami layanan produk keuangan dari lembaga Bank, Pegadaian, PNM, leasing, Pinjaman online dan lainnya.....	63
Gambar 4. 8 Responden memahami pembuatan laporan keuangan.....	64
Gambar 4. 9 Responden pernah mengakses jasa produk keuangan bank atau non bank.	65
Gambar 4. 10 Responden pernah melakukan pinjaman modal usaha dari bank.....	65
Gambar 4. 11 Responden mendapat perbedaan pelayanan antara pria dan wanita.....	66
Gambar 4. 12 Responden pernah melakukan pinjaman dari lembaga non bank	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia memberikan dampak ke sektor kesehatan, ekonomi, sosial, maupun keuangan serta memberikan dampak negatif lebih besar bagi kelompok perempuan. Pemerintah tentu tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016.

Keberadaan SNKI Perempuan semakin menegaskan bahwa segmen perempuan sebagai salah satu segmen prioritas untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024. Visi SNKI Perempuan sendiri yakni memastikan bahwa semua perempuan di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk mencapai dan menikmati pemberdayaan ekonomi yang merujuk pada kesetaraan gender.

Masih banyak intervensi yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan. Padahal akses terhadap layanan keuangan juga memungkinkan masyarakat khususnya perempuan untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu secara keseluruhan, inklusi keuangan juga berkontribusi terhadap kestabilan keuangan suatu negara apalagi dalam kondisi pandemi. Besar harapan webinar hari ini dapat memberikan jalan terang tentang

implementasi dalam mempercepat keberhasilan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Adapun area prioritas SNKI yakni Edukasi dan Literasi Keuangan, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan, layanan keuangan digital untuk perempuan, memperluas akses ke asuransi dan dana pensiun; perlindungan konsumen, dukungan komprehensif dan pemberdayaan bagi perempuan pengurus rumah tangga (*caregiver*), pengumpulan data terpilah berdasarkan gender. Sedangkan, Kelompok sasaran perempuan yang menjadi target intervensi pelaksanaan SNKI Perempuan ada 4 kategori, yaitu:

- 1) Perempuan dalam kelompok pendapatan 40 persen terendah;
- 2) Perempuan pekerja, terutama pekerja migran;
- 3) Perempuan pemilik UMKM; dan
- 4) Perempuan pengurus rumah tangga.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang memuat berbagai kebijakan stimulus fiskal, antara lain antara lain berupa restrukturisasi kredit, stimulus pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), subsidi bunga, dan restrukturisasi pembiayaan.

Berbagai kebijakan ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok perempuan, khususnya oleh *NGO*, Ormas dan Perempuan Pengusaha. Strategi ini

dikeluarkan dengan tujuan untuk mempromosikan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di antara masyarakat dan daerah untuk mendukung kesejahteraan bersama. Penajaman strategi melalui SNKI Perempuan memiliki tujuan khusus agar memastikan perempuan bebas dari intervensi dalam akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi. Nantinya strategi SNKI perempuan akan menyediakan program komprehensif yang responsif gender bagi semua perempuan di Indonesia untuk mengakses semua layanan keuangan formal. Kemudian akan dilakukan pembekalan kepada semua perempuan di Indonesia dengan keterampilan keuangan (termasuk digital) untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, termasuk manajemen usaha dan perlindungan konsumen. Akan dibangun pula lembaga keuangan ramah perempuan yang menyesuaikan layanan dan produk mereka untuk kebutuhan spesifik perempuan yang beragam. Selain itu, menumbuhkan lingkungan usaha yang ramah perempuan, yang memfasilitasi kemampuan usaha perempuan untuk tumbuh dan mengakses pasar, serta berkontribusi pada perekonomian juga menjadi misi dari SNKI Perempuan. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).

Tabel 1. 1 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

Posisi Kredit	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit		
	2017	2018	2019
Mikro	221,41	251,34	277,23
Kecil	282,78	312,07	332,12
Menengah	438,2	469,24	488,79
Total UMKM	942,39	1 032,64	1 098,14

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data di atas dapat diketahui jumlah proporsi kredit umkm setiap tahunnya terhadap total kredit setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada posisi usaha kecil masih lebih sedikit dibandingkan dengan posisi usaha menengah. Contohnya pada tahun 2017 posisi usaha mikro mencapai 221,41 Milyar rupiah sedangkan pada posisi usaha menengah mencapai 438,2 Milyar rupiah. Artinya masih dapat kesenjangan untuk penyerapannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, indeks inklusi keuangan perempuan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan laki-laki. Ia menyebut, indeks inklusi keuangan perempuan di Indonesia sebesar 75,15%, lebih kecil dari indeks inklusi keuangan laki-laki Indonesia yang sebesar

77,24%. Dengan demikian, jumlah perempuan yang mengakses atau menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, teknologi finansial, dan lain-lain masih lebih rendah daripada laki-laki.

Meski begitu, indeks inklusi keuangan perempuan di Indonesia masih lebih tinggi daripada indeks inklusi keuangan perempuan di dunia yang menurut data Bank dunia pada tahun 2017 sebesar 65%. Pemerintah kemudian tergerak meningkatkan inklusi keuangan perempuan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, pemerintah sudah mendukung perempuan dengan berbagai program, seperti program PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang memberi dana dengan suku bunga sangat murah. Dari 10,8 juta peminjam, mayoritasnya adalah perempuan. Selain itu, ada program pembiayaan ultra mikro (UMI) sebesar Rp 10 triliun untuk 5,8 juta orang dan mayoritasnya adalah perempuan. Ada juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp 238 triliun diberikan pada 5,8 juta pengusaha termasuk perempuan. Pemerintah juga mendorong perempuan untuk menjadi pengusaha yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Tabel 1. 2 Posisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (juta rupiah) Tahun 2015-2019

Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (juta rupiah), 2015 - 2019					
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Rantau Prapat	0	0	0	0	0
Kota Padangsidempuan	840 018	869 306	307 805	918 945	942 024
Kota Kisaran	0	0	0	0	0
Kota Tebing Tinggi	649 072	791 499	845 791	855 620	890 738
Kota Tanjungbalai	438 363	437 225	499 473	550 056	522 471
Kota Sibolga	486 031	492 399	525 751	602 444	575 064
Kota Pematangsiantar	1 119 794	1 310 162	1 484 876	1 488 740	1 423 824
Kota Medan	18 949 951	19 001 126	20 001 798	22 677 148	22 525 252
Kota Binjai	775 278	748 045	787 011	1 045 343	1 095 755
Kab. Toba	503 952	563 356	617 407	751 412	911 621
Kab. Tapanuli Utara	655 974	729 295	740 133	954 007	1 157 376
Kab Tapanuli Tengah	753 534	742 410	691 320	781 072	860 105
Kab. Tapanuli Selatan	729 254	658 812	635 906	846 133	1 022 736
Kab. Simalungun	1 664 104	1 782 175	1 809 514	2 117 305	2 317 304
Kab. Nias	248 886	272 636	295 722	317 798	403 267
Kab. Mandailing Natal	1 273 949	1 281 661	1 312 467	1 781 411	1 843 965
Kab. Langkat	1 574 420	1 655 931	1 822 491	2 205 555	2 481 032
Kab. Labuhanbatu	3 044 651	2 766 981	2 465 487	2 573 132	2 819 256
Kab. Karo	1 229 670	1 363 326	1 619 410	1 712 214	1 891 964
Kab. Deli Serdang	4 384 649	4 571 323	5 039 248	6 224 915	6 595 494
Kab. Dairi	835 242	889 156	948 633	1 023 422	1 095 324
Kab. Asahan	2 298 856	2 287 850	2 208 444	2 564 428	2 905 107
Kab. Lainnya	4 399 539	3 991 240	4 952 445	4 753 630	4 935 887
Jumlah	46 079 909	47 205 914	49 611 132	56 744 730	59 215 567

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh)

Sumber : Bank Indonesia

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa posisi kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan dari tahun 2015 sampai 2018 semakin meningkat dan sedikit menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2015 posisi kredit usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 18.949.951 juta, tahun 2016 sebesar 19.001.126 juta, tahun 2017 sebesar 20.001.798 juta, pada tahun 2018 sebesar 22.677.148 juta dan pada tahun 2019 sebesar 22.525.252 juta.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, di berbagai belahan dunia isu mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) tengah hangat diperbincangkan. Perhatian khusus terhadap literasi keuangan di akibatkan oleh keinginan sebuah negara untuk memiliki penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik, sehingga akan berdampak pada perbaikan roda ekonomi negara itu sendiri. Literasi keuangan (*Financial Literacy*) dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan untuk mencapai. Literasi keuangan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perencanaan keuangan adalah tentang bagaimana cara menjalani hidup hari ini yang sederhana sesuai dengan kemampuan keuangan dan sementara itu mempersiapkan masa depan yang sejahtera. Ketidapkahaman akan pentingnya literasi keuangan dapat mengakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan sehingga mudah dipengaruhi oleh penjual produk keuangan, hal tersebut tentunya dapat menghambat dalam pembangunan ekonomi negara. Kenyataannya di kehidupan sehari-hari, tidak semua orang memiliki pengetahuan keuangan yang

cukup atau dikatakan *well literate*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Master Card* (2013), Indonesia menduduki peringkat ke-14 dan tertinggal jauh dengan Malaysia yang menduduki peringkat ke-6. Indonesia sendiri melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakatnya melalui OJK. Survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 21,84% atau seperlima dari penduduk Indonesia yang sudah terkategori *well literate*. Subjek penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sayangnya perkembangan finansial UMKM ini tergolong lambat, padahal kesuksesan mereka akan berdampak tidak hanya bagi kemajuan usaha mereka sendiri tetapi juga dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Hal ini dikarenakan berdasarkan beberapa penelitian tentang pelaku usaha masih ditemukan rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan para pelaku usaha. Kurangnya literasi keuangan akan menyebabkan seseorang lebih cenderung memiliki masalah dengan hutang, terlibat dengan biaya kredit yang lebih tinggi dan kecil kemungkinannya untuk merencanakan masa depan (Lusardi, 2010). Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam surat edaran OJK 2014 menyatakan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Adanya literasi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. OJK memiliki program guna meningkatkan

indeks literasi keuangan di Indonesia dalam bentuk Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Kerangka dasar SNLKI terdiri atas tiga pilar yaitu : (1) Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, (2) Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan, dan (3) Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan.

Literasi tentang keuangan tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bagi perempuan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena berkaitan dengan kemampuan untuk akses terhadap keuangan yang lebih baik dan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya. Pemahaman itulah yang akan memberikan akses untuk memperoleh layanan keuangan seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan tidak lagi menggunakan jasa rentenir dengan bunga yang sangat besar yang akan memberikan dampak buruk kedepannya. Karena sejatinya rentenir seakan menjadi penolong masyarakat saat membutuhkan uang dengan proses yang cepat.

OJK mencatat, terdapat jarak antara indeks literasi (36,13 persen) dan inklusi keuangan (75,2 persen) untuk perempuan. Artinya, terdapat sekitar 75 orang dari setiap 100 perempuan yang memiliki akses layanan keuangan formal namun hanya sekitar 36 orang yang memiliki tingkat literasi yang tinggi. “Seiring dengan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia, upaya untuk menutup kesenjangan ini perlu terus dilakukan agar manfaat layanan keuangan digital juga dapat dirasakan oleh perempuan. Peneliti *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* Nailul Huda mengatakan bahwa budaya yang cenderung

mendorong perempuan untuk tidak bekerja di Indonesia memengaruhi kebutuhan terhadap rekening bank, sehingga inklusi keuangannya pun lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan masih terkendala masalah jaminan, sementara lembaga pembiayaan cenderung memandang sebelah mata kaum muda, dan UMKM sulit mengakses pembiayaan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan respons kebijakan.

Tabel 1. 3 Data Rekapitulasi Jumlah UMKM Kota Medan Tahun 2018

Sektor usaha	Jumlah UMKM	PRESENTASE (%)
Produksi	301 Usaha	38,94
Kuliner	438 Usaha	56,66
Jasa	31 Usaha	4,02
Perternakan dan perikanan	3 Usaha	0,38
Jumlah	773 Usaha	100

Sumber : *Dinas Koprasi dan UMKM Kota Medan 2018*

Pada gambar 1.1 dijelaskan bahwa keberadaan UMKM di kota Medan sangat bervariasi. Data yang diperoleh informasi bahwa sektor usaha kuliner merupakan sektor usaha yang memiliki persentase tertinggi di kota Medan yakni sebesar 56,66% dan sektor usaha peternakan dan perikanan merupakan sektor usaha yang memiliki persentase terkecil yakni sebesar 0,38%.

Berdasarkan informasi jumlah UMKM yang sangat banyak, hal itu juga tidak menjadi penentu dalam menyelesaikan pengangguran di kota Medan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Medan tingkat pengangguran terbuka

berdasarkan daerah tempat tinggal pada tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di perkotaan selalu memiliki angka yang lebih tinggi. Seperti pada tahun 2017 di kota tingkat pengangguran sebesar 62.8% sedangkan di pedesaan tingkat pengangguran sebesar 37.2% (BPS,2018).

Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“INKLUSI KEUANGAN BAGI PEREMPUAN : ANALISIS LITERASI DAN AKSESIBILITAS BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KOTA MEDAN.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat beberapa masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Kurangnya tingkat literasi keuangan pada pelaku usaha perempuan
2. Kurangnya keterlibatan dan aksesibilitas perempuan dalam pemanfaatan pinjaman modal usaha

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini dibatasi hanya pada inklusi keuangan bagi perempuan tentang literasi dan aksesibilitas bagi pelaku usaha kecil di kota Medan.

1.3.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat literasi tentang keuangan pelaku usaha kecil perempuan di kota Medan?
2. Bagaimana aksesibilitas pelaku usaha kecil perempuan dengan produk layanan keuangan di kota Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis tingkat literasi tentang keuangan bagi pelaku usaha kecil perempuan di kota Medan
2. Untuk menganalisis apakah pelaku usaha perempuan mengakses produk keuangan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dari sisi akademik dan non akademik.

A. Manfaat Akademik

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- 2) Sebagai tambahan literature terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- 2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

B. Manfaat Non – Akademik

- 1) Memberikan edukasi tentang literasi dan aksesibilitas keuangan bagi pelaku usaha kecil perempuan di kota Medan.
- 2) Penelitian ini nantinya dapat di jadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi pemerintah khususnya dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori uang

A. Teori Keynes

Teori uang Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* yang telah dipaparkan sebelumnya, dikatakan bahwa teori uang Keynes adalah teori yang berasal dari teori Cambridge, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul berbeda dengan teori moneter klasik. Pada hakikatnya perbedaan ini terletak pada penekananan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai *store of Wealth* dan bukan sebagai *medium of exchange* saja. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori *Liquidity Preference*. Dalam teori *Liquidity Preference* ini Keynes memaparkan bahwa ada tiga motif seseorang untuk memegang uang tunai yaitu motif transaksi (*transaction motive*), motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan motif spekulasi (*Speculative motive*). Pertama, motif transaksi. Permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat national income dan tingkat suku bunga. Semakin tinggi national income semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi. Demikian pula Keynes berpendapat bahwa permintaan akan uang untuk tujuan transaksi inipun tidak merupakan suatu proporsi yang selalu konstan, tetapi dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya tingkat bunga (seperti halnya dalam teori

cambridge). Hanya saja faktor tingkat bunga untuk permintaan transaksi untuk uang ini tidak ditekankan oleh keynes (seperti halnya teori cambridge) dalam analisis selanjutnya. Salah satu sebab adalah karena ia ingin menekankan peranan tingkat bunga dalam penentuan permintaan akan uang untuk tujuan lain, yaitu spekulasi. Kedua, motif berjaga-jaga. Keynes mengemukakan pengeluaran diluar rencana transaksi normal, misalnya untuk pembayaran keadaan-keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran yang tak terduga lain. Menurut keynes permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang untuk bertransaksi, yaitu terutama dipengaruhi oleh tingkat penghasilan orang tersebut, dan mungkin dipengaruhi pula oleh tingkat bunga. Ketiga, motif spekulasi. Sesuai dengan namanya, motif dari pemegang uang ini adalah terutama bertujuan untuk memperoleh “keuntungan” yang bisa diperoleh, seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan betul. Konsep teori keynes secara garis besar, uang dianggap tidak memberi penghasilan, sedang obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode yaitu berupa bunga. Dengan kehadiran bunga ini, motif seseorang tidak lagi hanya atas alasan transaksi dan berjagajaga, tetapi juga berdasarkan motif spekulasi. Motif spekulasi ini terbentuk akibat bunga mendorong uang menjadi komoditi, dimana sejumlah uang memiliki harganya sendiri yaitu bunga. Dan mau tidak mau terbentuklah pasar bagi komoditi uang ini. Orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga diwaktu mendatang yang berarti juga perubahan harga pasar obligasi diwaktu mendatang dengan membeli obligasi dan menjualnya

diharapkan akan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, menurut Keynes bila tingkat bunga diperkirakan turun maka orang lebih suka memegang kekayaan dalam bentuk obligasi daripada uang tunai, karena bukan hanya obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode tapi juga bisa memberikan penghasilan capital gain berupa kenaikan harga obligasi. Dan bila tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka orang akan memilih memegang uang tunai daripada obligasi. Pendapat Keynes ini menunjukkan bahwa seseorang dihadapkan kepada dua keadaan dan dua pilihan dalam memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai atau aset non riil berupa obligasi. Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan, sedangkan obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu yang merupakan harga setiap periode dari uang tersebut. Motif spekulasi ini sesuai dengan konsep teori modern konvensional yaitu time value of money yang berarti nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat berinvestasi dan bisa mendapatkan bunga, atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu. Dan dalam konsep ini harga uang yang harus dibayar untuk penggunaan uang adalah tingkat bunga.

B. Teori Setelah Keynes

Perkembangan dari teori yang dikemukakan oleh Keynes didasarkan pada motif transaksi (W.J. Boumol) dan motif spekulasi (James Tobin)

a. Pendekatan inventori/ penyediaan Boumol dan tobin: Permintaan akan uang di masyarakat seperti halnya permintaan terhadap persediaan (*stock*) yang setiap saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk mengelola dibutuhkan biaya, maka dari itu dibutuhkan jumlah persediaan yang optimum (biaya minimum). Permintaan uang untuk tujuan transaksi memiliki manfaat, tetapi memegang uang juga ada biaya tersendiri:

- 1) Biaya transaksi yang dikeluarkan dari penukaran antara obligasi dan uang tunai
 - 2) Opportunity cost dari uang yang dipegang, yaitu tingkat bunga dari obligasi (r)
- Optimalisasi dalam penentuan uang kas (persediaan) yang dapat meminimumkan biaya dapat dijelaskan sbb. Biaya total untuk memegang uang kas (TC) terdiri dari biaya perantara ($b.T/C$) dan biaya bunga ($r.C/2$) dengan rumusan: $TC = b.(T/C) + r.(C/2)$
- Jumlah uang kas yang optimal (C): $(dTC/dC) = -b.T/2 + r/2 = 0$
- Maka: $C = 2bT/r$
- Uang kas yang ditahan seseorang pada setiap saat $C/2$, maka: Permintaan uang kas riil dapat ditunjukkan persamaan sebagai berikut: $Md/P = C/2 = \frac{1}{2} \frac{2bT}{r}$ atau $Md = \frac{1}{2} \frac{2bT}{r} .P$
- Terdapat implikasi dari teori yang dikemukakan oleh Boumol sebagai berikut:

- Tingkat bunga berpengaruh terhadap permintaan uang sebagai tujuan dari transaksi, karena seseorang dalam memegang uang terdapat *opportunity cost*.

- Dalam penggunaan uang terdapat *economies of scale*, artinya jika ada kenaikan pendapatan yang diperoleh (nilai transaksi, T) maka presentasi kenaikan uang yang diperoleh (Md) lebih kecil daripada kenaikan transaksinya.
- Permintaan akan uang sebagai bentuk dari tujuan transaksi tergantung dengan tingkat bunga yang ada serta biaya dari perantara (teori Keynes: permintaan uang untuk transaksi hanya dipengaruhi oleh pendapatan).
- Teknologi yang terus berkembang dapat mengakibatkan semakin turunnya ongkos/biaya dari transaksi dan mengakibatkan pada turunnya uang kas yang dipegang oleh seseorang
- Motif permintaan uang dimasyarakat untuk berjaga-jaga ini muncul dikarenakan adanya ketidakpastian dari pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran.

b. Teori kuantitas modern (Friedman) Teori Friedman tidak bertolak belakang mengenai pembahasapembahasan motif dari seseorang untuk memegang uang. Seseorang mau memegang uang karena uang merupakan bentuk dari salah satu aktiva yang memberikan manfaat ke orang tersebut, karena uang bersifat liquid sebagai sumber daya beli. Teori permintaan akan uang yang dikemukakan oleh Friedman menganggap bahwa seseorang akan memutuskan kekayaan yang dimilikinya (termasuk uang tunai) berdasarkan dari perbandingan manfaat yang akan orang tersebut

peroleh (penghasilan dalam bentuk in natural atau penghasilan dalam bentuk uang ataupun “*utility*”), selera dari seseorang tersebut dan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Manfaat yang diperoleh seseorang dari setiap bentuk aktiva berpengaruh terhadap seberapa banyak aktiva-aktiva yang akan orang tersebut miliki. Marginal rate of substitution dari suatu aktiva yang dipegang akan menurun dari aktiva-aktiva lain, jika aktiva yang dipegang tersebut semakin banyak. Artinya jika seseorang terlalu banyak dalam memegang suatu aktiva, maka manfaat marginal dari aktiva yang dipegang tersebut akan semakin kecil, misalnya aktiva dalam bentuk uang, semakin banyak uang yang dipegang, maka marginal return dari uang tersebut akan semakin kecil dari aktiva-aktiva lainnya. Pendapat yang dikemukakan oleh Friedman bahwa permintaan uang dimasyarakat dipengaruhi oleh faktor berikut: obligasi, suku bunga “*equities*”, modal fisik dan kekayaan yang berpengaruh terhadap penentuan harga dari permintaan uang. Pendapat yang dikemukakan oleh Friedman bahwa masyarakat memegang uang sebagai bentuk dari menyimpan kekayaannya, cara lain yang dilakukan seseorang untuk menyimpan kekayaannya, yaitu menyimpan uang dalam bentuk deposito, obligasi, saham, dan menyimpan harta dalam bentuk tetap (tanah dan rumah) serta kekayaan manusiawi. Dari teori-teori tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang yang dikembangkan oleh Friedman berdasarkan teori kuantitas modern, dapat dituliskan kedalam bentuk persamaan sebagai berikut: $M_d = f(P, r, r_{FC}, Y)$ Dimana permintaan uang

nominal dapat dijelaskan oleh Md , P merupakan tingkat harga, r merupakan tingkat suku bunga, rFC merupakan suatu bentuk dari tingkat pengembalian modal fisik, pendapatan dan kekayaan adalah Y . Pandangan yang dikemukakan oleh Friedman tentang permintaan akan uang riil, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut: $Md/P = f(\Delta P, r, Y)$ Dimana permintaan uang riil adalah Md/P , ΔP merupakan tingkat kenaikan dari harga, r merupakan tingkat bunga dan nilai dari pendapatan serta kekayaan riil adalah (Ambarani, 2015).

2.1.2 Teori Konsumsi Keynes

Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial memiliki beragam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan konsumsi. Dari mulai mengonsumsi makanan, pakaian, juga berbagai jenis jasa. Menurut P.A. Samuelson dan W.D. Nordhaus dalam buku berjudul Makro-Ekonomi (1992) konsumsi adalah salah satu bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan. Mengingat betapa pentingnya konsumsi bagi manusia, para ahli merumuskan berbagai teori konsumsi. Salah satu teori konsumsi yang paling dikenal adalah teori konsumsi John Maynard Keynes yang dikemukakan pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul *The General Theory*. Teori konsumsi menurut Keynes Dalam teori konsumsinya Keynes mengemukakan dua pandangan utama yaitu: Pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung pada

besarnya pendapatan. Di mana konsumsi cenderung lebih kecil dari pendapatan.. Teori ekonomi Keynes berbeda dengan ekonom klasik yang hanya mengkaji kasus pekerja penuh. Hal tersebut karena teori Keynes berlaku dalam sistem ekonomi secara keseluruhan baik ekonomi individu (pekerja penuh, pekerja paruh, dan pengangguran), industri, perusahaan, maupun pemerintahan. Inilah penyebab teori Keynes disebut *the General Theory* atau teori umum karena berlaku secara umum dalam ekonomi. Keynes juga menyatakan bahwa ada konsumsi yang tetap dipenuhi seperti kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut dinamakan dengan konsumsi otonomus yang tetap harus dipenuhi walaupun pendapatan yang dimiliki sama dengan nol. Pengeluaran konsumsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tidak memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan.

Keynes memercayai prinsip *effective demand* atau permintaan efektif. Marilyn Cohn dalam jurnal *The Economics of John Maynard Keynes* (1949) menyebutkan dasar prinsip *effective demand* adalah jika pendapatan riil meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat tetapi lebih kecil dari peningkatan pendapatan Hubungan Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan Hal tersebut karena ketika pendapatan meningkat, maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan otonomusnya. Sehingga bisa melakukan tambahan konsumsi (*marginal propensity to consume*) di luar dari kebutuhan dasar. Milton Friedman dalam buku *A Theory of the Consumption Function* (1957) mengatakan Keynes memercayai aturan psikologis mendasar dari masyarakat modern bahwa ketika pendapatan riil meningkat, tidak akan meningkatkan konsumsinya dengan jumlah

absolut yang sama karena meningkatnya besar tabungan. Saat pendapatan naik, jumlah pendapatan yang ditabung juga akan ikut naik atau lebih besar dari sebelumnya. Sehingga kecenderungan konsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) akan turun. Orang dengan pendapatan lebih besar cenderung menabung dalam jumlah besar juga karena memperhitungkan jumlah suku bunga yang akan diperoleh.

2.1.3 Inklusi Keuangan

A. Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016) tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Inklusi keuangan adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dari berbagai belahan dunia, untuk menurunkan financial exclusion dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania atau melalui berbagai program terpisah, misal edukasi keuangan seperti dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai

dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran (TKI) sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum (Bank, 2018).

Menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan.

Dikutip dari website resmi BadanKebijakan Fiskal Keuangan inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

OJK sebagai regulator jasa keuangan di Indonesia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai:“ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” *The United Nations Millennium Development Goal Summit 2010* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai layanan keuangan yang dimaksud harus disediakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta berada di dalam lingkungan regulasi yang kondusif. *World Bank (2014)* mendefenisikan inklusi keuangan sebagai individu dan usaha yang memiliki akses atas produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka, yaitu transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi, yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

B. Manfaat inklusi Keuangan

Inklusi keuangan memiliki banyak manfaat. Menurut (Bank, 2018), peningkatan inklusi keuangan dengan nilai satu persen saja, maka pertumbuhan ekonomi bertambah 0,03 persen. Belum lagi efek lain dari inklusi keuangan dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, hingga meminimalisir kesenjangan sosial. Selain itu, inklusi keuangan juga diharapkan mampu memberi sumbangan lebih untuk negara, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- 2) Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- 3) Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.
- 4) Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- 5) Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- 6) Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.
- 7) Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- 8) Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

C. Visi dan Tujuan Inklusi Keuangan

Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016) Visi keuangan inklusif dibuat atau dirumuskan dalam mewujudkan peningkatan akses

masyarakat terhadap layanan keuangan formal lewat peningkatan pemahaman atas sistem, produk dan jasa keuangan, serta ketersediannya layanan keuangan formal yang berkualitas secara lancar, tepat waktu, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan, yaitu :

- 1) Strategi inklusi keuangan dijadikan bagian dari strategi besar dalam pembangunan ekonomi, Penanggulangan angka kemiskinan, kesetaraan pendapatan, dan terwujudnya stabilitas system keuangan. masyarakat miskin dan marjinal adalah kelompok yang mempunyai keterbatasan dalam hal akses ke layanan keuangan.
- 2) Menyediakan baik jasa maupun produk keuangan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Konsep inklusi keuangan harus bisa memenuhi segala kebutuhan dari segmen masyarakat yang berbeda melewati serangkaian layanan holistik secara menyeluruh.
- 3) Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang layanan keuangan. Problem utama dalam inklusi keuangan adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keuangan yang rendah. Pengetahuan sangat penting supaya masyarakat merasa lebih aman atau terlindungi saat berinteraksi dengan lembaga keuangan.
- 4) Meningkatkan akses dari masyarakat pada layanan keuangan.

Masalah bagi orang miskin dalam mengakses layanan keuangan pada umumnya berupa kendala administrasi dan masalah geografis. penyelesaian masalah tersebut menjadikan terobosan mendasar didalam menyederhanakan akses pada jasa keuangan.

- 5) Memperkokoh sinergi antara lembaga keuangan mikro, bank, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus bisa menjamin yang tidak hanya pemberdayaan dalam kantor cabang, tapi juga peraturan yang bisa membuat perluasan layanan keuangan. Oleh karena itu sinergi antara lembaga keuangan mikro, bank, dan lembaga keuangan non bank menjadi sentral khususnya didalam mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan.
- 6) Memaksimalkan peran dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memperluas area layanan keuangan. Teknologi bisa meminimalisir biaya transaksi dan perluasan system keuangan formal melampaui dari sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun peraturan dan pedoman yang jelas adanya perlu ditetapkan dalam menyeimbangkan resiko dan perluasan jangkauan.

D. Strategi Nasional Inklusi Keuangan

Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau lebih dikenal SNKI 2016 membagi strategi inklusi keuangan menjadi 5 pilar utama (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016), yaitu :

- 1) Edukasi keuangan, yang berupaya untuk bisa meningkatkan

pengetahuan serta kesadaran masyarakat atas produk serta jasa keuangan yang berada didalam pasar keuangan yang formal. Edukasi keuangan dalam ini antara lain seperti pengetahuan serta kesadaran atas ragam dari jasa dan produk keuangan, pengetahuan serta kesadaran atas resiko-resiko dalam produk keuangan, perlindungan untuk nasabah dan ketrampilan dalam mengelola keuangan.

- 2) Hak Properti Masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak dapat melakukan pinjaman dilembaga keuangan formal karena pinjaman formal pada umumnya mengharuskan memberikan jaminan berupa asset yang dimiliki. Hak properti masyarakat bertujuan dalam meningkatkan akses kredit dari masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
- 3) Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan, infrastruktur yang kurang merata di Indonesia sering kali menjadi hambatan masuknya masyarakat dalam lembaga keuangan formal fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan terhadap jangkauan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
- 4) Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah, pada pilar ini bertujuan dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non

tunai. Penyaluran nontunai merupakan upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan keuangan dan keterkaitan masyarakat dengan perbankan.

Perlindungan Konsumen, Pilar terakhir ini bertujuan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta mempunyai prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2.1.4 Teori Perbankan

A. Pengertian Bank dan Non Bank

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2010 : 68), definisi dari Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam buku Pemasaran Bank Kasmir, SE, MM (Tahun 2012 hal 8), Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan jasa-jasa bank lainnya. Pengertian Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Very

Stuart Bank adalah Suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa giral. Menurut A. Abdurrahman bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan. Secara umum bank dibagi menjadi empat jenis-jenis sebagai berikut :

1. Bank Sentral Merupakan bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu Negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud emas atau perak atau keduanya.
2. Bank Umum Merupakan bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Syariah Merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

B. Fungsi Bank

Adapun fungsi bank dalam buku Pemasaran Bank Kasmir,SE. MM (tahun 2012 hal 9) adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang untuk berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*). Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab.

- b) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveler cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2.1.5 Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) Nomor 76/POJK.07/2016 literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang memengaruhi kesejahtraannya.

A. Manfaat Literasi Keuangan

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) Adapun manfaat dari literasi keuangan antara lain:

- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.

- 2) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
- 3) Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Untuk lebih mengedukasi masyarakat agar semakin paham di bidang keuangan OJK merencanakan tiga pilar utama dalam program strategi nasional literasi. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan dan ketiga, tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

B. Tujuan Literasi Keuangan

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

C. Ruang Lingkup Literasi Keuangan

Chen dan Volpe (1998) dalam Akmal & Saputra (2014) menjabarkan literasi keuangan dalam 4 dimensi yaitu :

- a. ***personal finance***, yaitu proses perencanaan dan pengendalian keuangan dari unit individu atau keluarga. Dengan kata lain personal finance adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang (Novandriani et al., 2017).
- b. ***Saving and Borrowing***, kemampuan untuk memahami hal hal yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman. Bentuk simpanan di bank yang berupa tabungan, deposito bejangka , giro dan sertifikat deposito. 27
- c. ***Insuance***, pemahaman yang mendasar mengenai pengertian asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.
- d. ***Investment***, pemahaman dasar yang berkaitan dengan investasi seperti suku bunga, risiko investasi, pasar modal, reksadana dan deposito. Nababan dan Sadalia (2012) menjelaskan terdapat beberapa aspek dari literasi keuangan:
- e. ***Basic Personal Finance***, yang berarti pengetahuan dasar mengenai keuangan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pengetahuan ini meliputi inflasi, suku bunga, likuiditas aset dan lain lain.
- f. ***Cash Management*** (manajemen keuangan), kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya dengan baik dan tepat. Bila seorang individu telah mengelola keuangan dengan baik, dapat diartikan bahwa tingkat literasi keuangan orang tersebut baik.
- g. ***Credit and Debt Management*** (manajemen hutang), pengelolaan pinjaman yang diterima meliputi penggunaan dana, jenis pinjaman, jangka waktu,

bunga dan cara pelunasanya.

- h. ***Saving*** (Tabungan), Bagian dari penghasilan seseorang yang tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi, namun dialokasikan sebagai opsi untuk kebutuhan yang mendesak.
- i. ***Investasment*** (Investasi), meliputi pengetahuan seseorang dalam mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomis yang lebih di masa yang akan datang.
- j. ***Risk Management*** (Manajemen Risiko), suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian guna mencapai tujuan.

D. Tingkat literasi keuangan Indonesia

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- 1) ***Well literate*** (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- 2) ***Sufficient literate*** (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa 20 keuangan,

termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

3) *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4) *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan,sertlan dalam menggun

2.1.6 Aksesibilitas keuangan

A. Pengertian aksesibilitas keuangan

Aksesibilitas merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan layanan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkaun fisik layanan jasa keuangan seperti kantor bank dan jumlah atm.

Menurut Camara dan Tueta (2014) menyatakan bahwa tingkat inklusif keuangan ditentukan oleh tiga dimensi yaitu dimensi pemanfaatan, dimensi hambatan, dan dimensi akses. Adapun indikator pemanfaatan menurut camara dan tuesta di lembaga keuangan formal atau perbankan. Indikator hambatan yaitu berupa pandangan individu yang tidak mengakses pada layanan perbankan. Adapun hambatan yang dimaksud yaitu jarak terhadap kantor lembaga keuangan formal, pemenuhan persyaratan berkas yang sulit dipenuhi, terkendali biaya, dan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan formal. Sedangkan indikator dimensi

akses yaitu dilihat dari jumlah atm dan jumlah kantor bank terhadap penduduk, serta jumlah atm kantor bank dalam radius tertentu. Jumlah kantor bank dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan atau jasa keuangan dan juga meningkatkan inklusi keuangan. Semakin banyak jumlah kantor bank, maka akan lebih memudahkan pihak perbankan bertemu dengan calon-calon nasabah serta akan lebih mudah mengeluarkan maupun menerima jasa perbankan baik itu kantor cabang dan yang lain.

Chakravarty dan Pal (2013), mengemukakan dewasa merupakan salahsatu indikator untuk mengukur tingkat inklusi keuangan. Berdasarkan Bank Indonesia bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi akses meliputi; Pertama, jumlah bank per 100.000 penduduk dewasa. Kedua, jumlah kantor bank per seribu kilometer yaitu sebagai seluruh jaringan atau unit kantor bank yang tercatat dapat memeberikan layanan keuangan kepada nasabah atau melakukan kegiatan operasional perbankan sebagaimana tujuannya. Kantor bank dimaksud meliputi, kantor cabang, kantor cabang pembantu (KCP), kantor kas, unit usaha syariah, kas mobil, payment point, agency, dan deposit taking company (DTC). Yang dimaksud dengan jaringan kantor adalah jaringan kantor bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah. Indikator ketiga, yaitu jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa, dan yang keempat, jumlah ATM per 1.00 kilometer dengan mesin ATM nasabah dapat menggunakan tarik tunai, transfer uang ke rekening lain, dan transaksi lainnya.

Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. *Alliance for Financial Inclusion (2010)* secara umum mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) indikator, sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan (*Access*): kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal.
- 2) Kualitas (*Quality*): sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan dalam opini dan sikap tentang produk-produk jasa keuangan yang tersedia bagi mereka.
- 3) Penggunaan (*Usage*): tidak hanya menekankan pada penggunaan layanan jasa keuangan, lebih memfokuskan pada aspek permanence and depth dari layanan dan produk sector keuangan di suatu negara.
- 4) Kesejahteraan (*Welfare*): mengukur dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan.

2.1.7 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

A. Pengertian UMKM

Secara umum, UMKM atau yang biasa dikenal dengan usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.

Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata 'mengorganisasikan', apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata 'mengoperasikan' dan 'memperhitungkan risiko'. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berdomisili di Kudus.
5. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang

tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi. Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200 juta dengan omset tahunan hingga Rp 1 miliar. Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp 200 juta sd Rp 10 miliar.

6. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan pengertian UKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.⁸ Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

B. Tujuan umkm

Perekonomian sebuah negara dapat ditopang oleh pendapatan yang berasal dari ekonomi kreatif industrinya. UMKM menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi kreatif sebuah negara. Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Tujuan UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

2.1.8 Lembaga Keuangan

A. Pengertian lembaga keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga **keuangan adalah** segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya adalah di bidang keuangan. Mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana kepada masyarakat.

Lembaga keuangan juga dapat diartikan sebagai institusi yang punya aset dalam bentuk keuangan dan berfungsi untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan. Baik itu sebagai pemberi dana untuk mendanai usaha, keperluan konsumtif, atau sebagai layanan keuangan non pendanaan.

Sederhananya, lembaga ini dapat berupa badan penghimpunan dana saja, badan penyaluran dana saja, ataupun kedua-duanya. Dengan menghimpun dana

dari masyarakat serta menyalurkan dana tersebut untuk keperluan pembiayaan, badan usaha ini dapat memperoleh keuntungan berupa bunga atau persentase.

B. Jenis Lembaga Keuangan

Apa saja jenis-jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Tentu saja masing-masing memegang peranan yang berbeda. Untuk detailnya, simak penjelasan berikut:

a) Lembaga Keuangan Bank

Sebagaimana yang telah disinggung pada awal pembahasan bahwa secara garis besar, terdapat dua jenis lembaga keuangan. Salah satunya adalah lembaga keuangan bank. Lembaga ini terdiri dari beberapa jenis bank, di antaranya sebagai berikut:

1. Bank Sentral

Bank sentral merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Dan di Indonesia, yang berperan sebagai bank sentral tak lain dan tak bukan adalah Bank Indonesia (BI). Lembaga ini termasuk lembaga negara yang sifatnya independen. Artinya, lembaga tersebut bebas menjalankan semua tugas dan wewenangnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maupun pihak lain.

Maka dari itu, tak heran bahwa Bank Indonesia punya andil besar dalam menjaga perekonomian negara, yakni agar nilai rupiah tetap stabil. Baik itu terhadap benda, jasa maupun kurs.

2. Bank Umum

Jenis lembaga keuangan bank selanjutnya adalah bank umum, yakni lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga yang satu ini juga melakukan layanan perbankan, baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, memberikan pinjaman atau kredit, dan menyimpan surat serta barang berharga. Selain itu, bank umum juga bertugas untuk membuat dan menerbitkan surat pernyataan hutang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, BRI Syariah, dan sebagainya merupakan deretan contoh bank umum yang biasanya kamu jumpai di wilayah atau domisili tempat tinggal kamu.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan referensi yang diperoleh laman [OJK](#) (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ialah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Dalam segala aktivitas usahanya, BPR tidak menyediakan layanan dalam pemindahan dana antara pengirim dan penerima dana. Cakupan kegiatan dan fungsi BPR jauh

lebih sempit daripada bank umum. Itu karena BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan seperti giro, kegiatan valas, maupun perasuransian. Inilah letak perbedaan antara BPR dengan bank umum.

Dalam kegiatan usahanya BPR memiliki fungsi untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun bentuk lain yang hampir sama. Selain itu, BPR juga berfungsi sebagai pemberi kredit layaknya bank umum. Dan lagi, aktivitasnya juga meliputi penyediaan pembiayaan serta penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito, deposito berjangka, dan tabungan pada pihak bank lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan

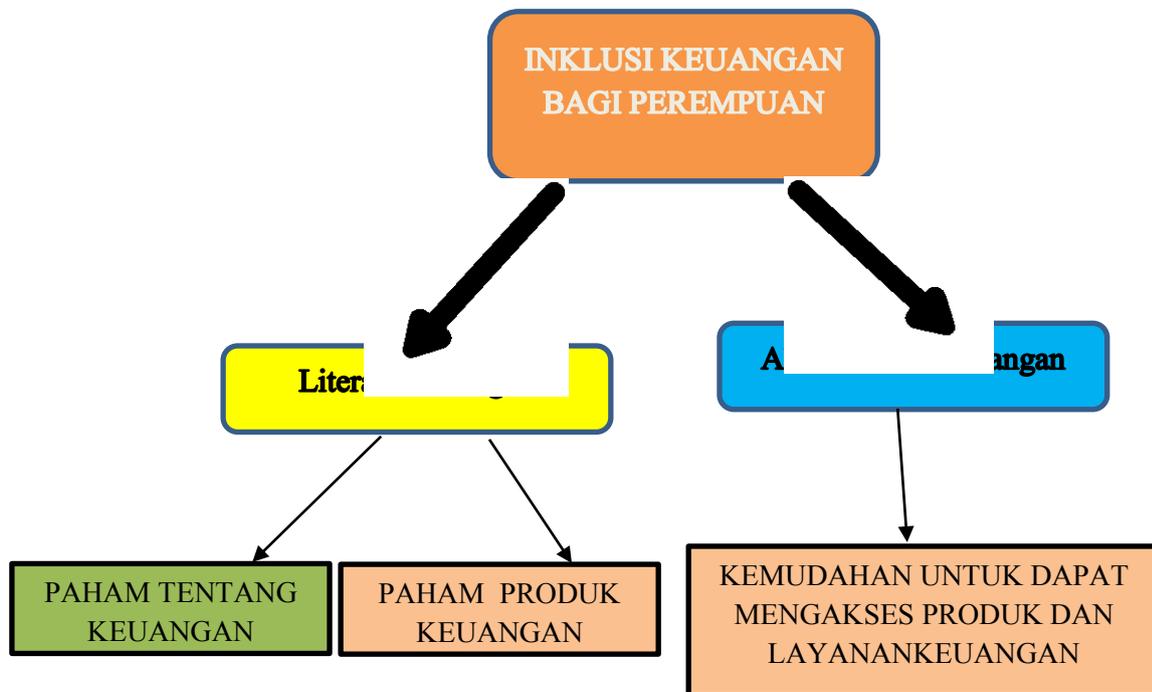
No	Judul Penelitian	Penulis Tahun, Metode, Sampel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur	Poppy Alvinolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, dan Mohammad Iqbal (2019), Penelitian dilakukan dengan Penelitian explanatory. Sampel berjumlah 100 responden yang Merupakan	Literasi keuangan Berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan inklusi keuangan Memiliki Pengaruh Signifikan terhadap kinerja usaha kecil.

	UMKM Kalimantan Timur	di	
--	-----------------------------	----	--

2	Tingkat Literasi Keuangan Syariah di kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Kinerja UMKM	Diana Djuwita & Ayus Ahmad Yusuf (2018). Penelitian ini menggunakan <i>descriptive survey</i> dan <i>explanatory survey</i> . Sampel berjumlah 31 UMKM yang 87% merupakan pedagang kaki lima.	Variabel lama usaha dan jumlah karyawan berpengaruh signifikan terhadap <i>financial knowledge</i> sedangkan seluruh variabel demografi tidak berpengaruh terhadap <i>financial behaviour</i> dan <i>financial attitude</i> pedagang kaki lima
---	--	---	--

3	<p>Pengaruh <i>Financial Inclusion</i> Terhadap Perkembangan UMKM (Study pada Pedagang di Pasar Cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan)</p>	<p>Annisa Choirunnisa (2018). Penelitian ini Menggunakan data kuesioner dan dianalisis dengan metode analisa regresi linier berganda. Sampel berjumlah 60 responden yang Merupakan pedagang di pasar Cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Terdapat pengaruh secara simultan pada variabel edukasi keuangan, hak Property masyarakat, Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, Layanan keuangan pada Sektor pemerintah dan Perlindungan Konsumen terhadap Kinerja UMKM. Penelitian ini juga menemukan Terdapat pengaruh parial hak property masyarakat dan Perlindungan Konsumen terhadap Kinerja UMKM.</p>
---	---	---	---

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara deskriptif bagi pedagang UMKM perempuan dalam pemahaman tentang keuangan maupun akses keuangan di kota Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kualitatif yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2013). Data yang dihimpun meliputi wilayah kota Medan.

3.2 Definisi Populasi

Definisi populasi merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun definisi populasi penelitian seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

NO	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
1	Inklusi Keuangan	Memahami serta megakses produk keuangan untuk pengembangan usaha	Kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing- masing.	Responden
2	Literasi Keuangan	Memahami tentang pengelolaan keuangan dan produk keuangan	Pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan	Responden

			keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan	
3	Aksesibilitas	Kemudahan bagi pelaku UMKM untuk menggunakan layanan produk keuangan sesuai kebutuhan.	Kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal.	Responden
4	UMKM	Pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya perempuan	Merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan)	Responden

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Medan yang dekat dengan universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 8 bulan yaitu Juni 2022 – Februari 2023.

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. (Kuncoro, 2013).

B. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data bersumber dari hasil kuesioner pelaku UMKM perempuan di kota Medan dengan pembagian kuesioner langsung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika data tidak berkembang lagi. Data primer diperoleh menggunakan kuesioner (angket) yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan secara serentak (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pendamping dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel ada dua yaitu:

1. *Purposive Sampling*

Purposive Sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sumber data adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data seperti yang tersebut diatas.

2. *Snowball Sampling*

Snowball Sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, makin kama semakin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.

3.6 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Algifari (2010) populasi adalah semua anggota obyek yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara itu menurut Tika (2006) populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas dan tidak terbatas.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kecil perempuan di kota Medan.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan (*subset*) dari unit populasi. Design sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability sampling*, pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini digunakan untuk memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2013).

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden dan sampel yang digunakan adalah pelaku usaha kecil perempuan di kota Medan.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengambil data dan analisis data. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktifitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktifitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta pembuktian. Ketiga alur aktifitas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data.

1. Reduksi data

Aktivitas reduksi data ialah mengelola data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang diringkas dan disistematisasikan, agar dipahami dan dicermati oleh pembaca. Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir data penelitian dapat dibuat verifikasi. Dalam hal ini peneliti memproses secara sistematis data-data akurat yang diperoleh terkait dengan proses dalam menjalankan bisnis usaha cafe terhadap perubahan perilaku orang, dari hasil wawancara dan observasi lapangan ditambahkan dengan dokumentasi yang ada, sehingga akhirnya penelitian ini dapat dipahami dan dicermati secara mudah oleh pembaca.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan menyusun informasi secara baik dan akurat untuk memperoleh beberapa kesimpulan yang valid dan merealisasikan procedural lanjutan. Dengan eksisnya data akurat ini secara otomatis membantu proses yang sedang terjadi, untuk diadakan analisis lebih lanjut, tentunya mengacu kepada data yang ada.

3. Penarikan kesimpulan dan pembuktian

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas analisis data. Aktivitas ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi yang diuraikan. Disamping itu, kendati data telah disajikan bukan berarti proses analisis data sudah final, akan tetapi masih ada tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan pertanyaan singkat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan. Dengan ungkapan lain adalah hasil temuan penelitian ini betul-betul merupakan karya ilmiah yang mudah dipahami dan dicermati.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Medan

A. Kondisi Geografis

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, batas wilayah medan adalah sebagai berikut:

Utara : Selat Malaka

Timur : kabupaten deli serdang

Selatan : kabupaten deli serdang

Barat : kabupaten deli Serdang

Kota medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan

kota/kabupaten lainnya Kota Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil dengan jumlah penduduk yang relative besar.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Medan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
1	Medan Tuntungan	20,68
2	Medan Johor	14,58
3	Medan Amplas	11,19
4	Medan Denai	9,05
5	Medan Area	5,52
6	Medan Kota	5,27
7	Medan Maimun	2,98
8	Medan Polonia	9,01
9	Medan Baru	5,84
10	Medan Selayang	12,81
11	Medan Sunggal	15,44
12	Medan Helvetia	13,16
13	Medan Petisah	6,82
14	Medan Barat	5,33
15	Medan Timur	7,76
16	Medan Perjuangan	4,09

17	Medan Tembung	7,99
18	Medan Deli	20,84
19	Medan Labuhan	36,67
20	Medan Marelan	23,82
21	Medan Belawan	26,25

Sumber : Data BPS Kota Medan

B. Kondisi Topografi Kota Medan

Topografi Kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut. Sebagian wilayah Kota Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu Pantai Barat Belawan dan daerah yang tergolong dataran tinggi seperti Kabupaten Karo. Oleh karena itu, suhu yang ada di kota Medan menjadi tergolong panas. Dari luas wilayah Kota Medan dapat dipersentasekan bahwa tingkat Pemukiman sebesar 36,3%, Perkebunan sebesar 3,1%, Lahan Jasa 1,9%, Sawah 6,1%, Perusahaan 4,2%, Kebun Campuran 45,4%, Industri 1,5%, Hutan Rawa 1,8%.

C. Kondisi Demografi Kota Medan

Penduduk Kota Medan yang tersebar dalam 21 Kecamatan dengan total penduduk sebanyak 2.279.894 jiwa yang terdiri dari 1.154.627 jiwa penduduk perempuan dan 1.125.267 jiwa penduduk laki-laki. Sebaran penduduk di tiap kecamatan cukup merata. Kecamatan Medan Deli memiliki jumlah penduduk

tertinggi sebesar 190.971 jiwa, yang terdiri dari 96.568 jiwa penduduk perempuan dan 94.403 jiwa penduduk laki-laki. Sedangkan penduduk terkecil berada kecamatan Medan Maimun sebesar 41.139 jiwa, yang terdiri dari 20.825 jiwa penduduk perempuan dan 20314 jiwa penduduk laki-laki.

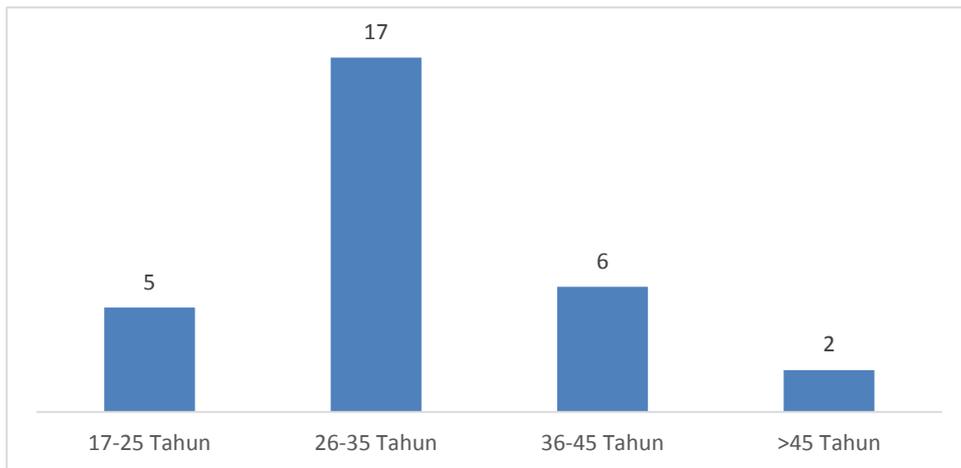
4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.2 Hasil

Pada bab ini penulis menganalisis data – data yang di peroleh dari hasil penelitian dengan menyebarkan angket (Kuesioner), kepada pelaku UMKM di Kota Medan, yang telah ditetapkan sebanyak 30 sampel. Menganalisis data merupakan satu upaya untuk menata dan mengelompokkan data untuk menjadi suatu bagian – bagian tertentu berdasarkan jawaban sampel penelitian. Analisis data yang dimaksud adalah interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan.

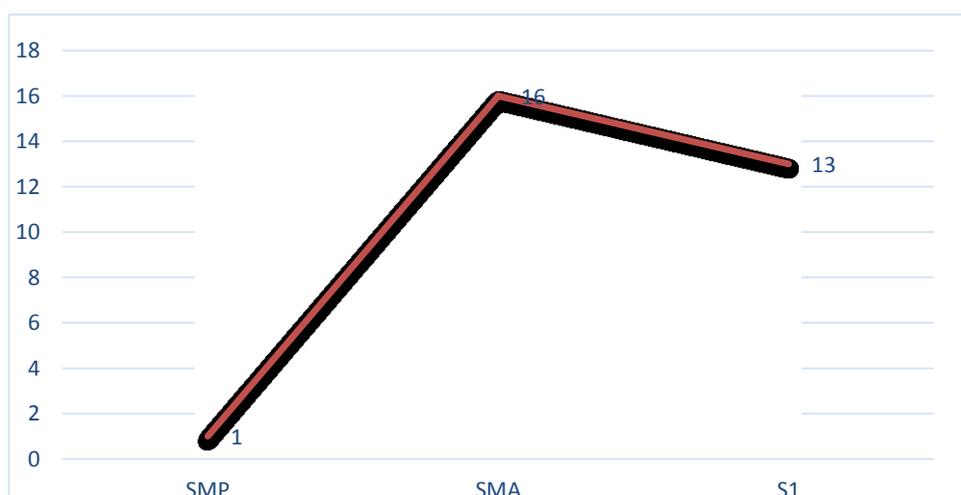
A. Deskriptif Kuesioner Responden

Dalam penelitian ini sampel yang telah ditetapkan sebagai responden memiliki kriteria tertentu. Teknik penarikan sample yang telah ditetapkan peneliti adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang dijadikan data atau sampel. Berdasarkan dengan data yang telah diolah, dengan 30 responden Usaha Mikro Kecil Menengah yang akan disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



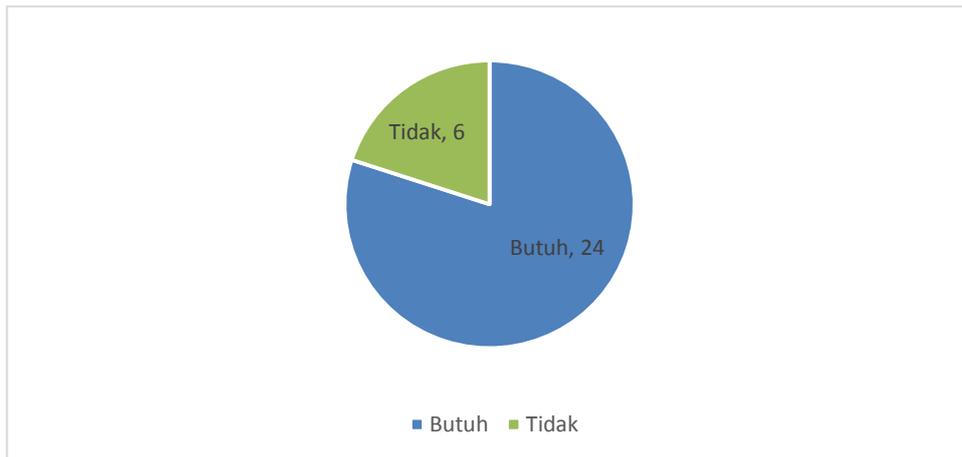
Gambar 4. 1 Responden berdasarkan usia

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden, usia paling banyak dikisaran usia 26-35 tahun yaitu 17 responden. Kemudian usia 36-45 tahun berjumlah 7 responden. Sedangkan untuk kisaran usia termuda yaitu 17-25 tahun berjumlah 5 responden dan usia lebih dari 45 tahun sebanyak 2 responden.



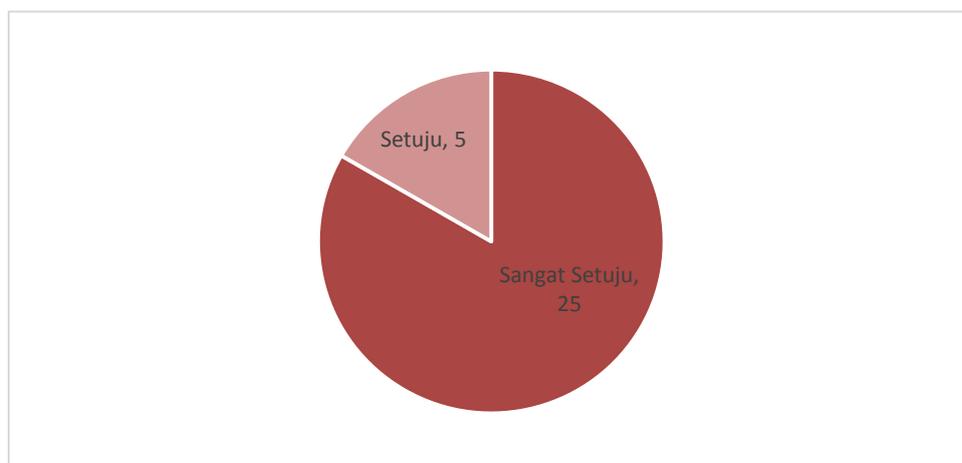
Gambar 4. 2 Responden berdasarkan strata pendidikan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden sebanyak 1 responden lulusan SMP. Kemudian lulusan SMA berjumlah 16 responden. Sedangkan untuk lulusan S1 yaitu berjumlah 13 responden.



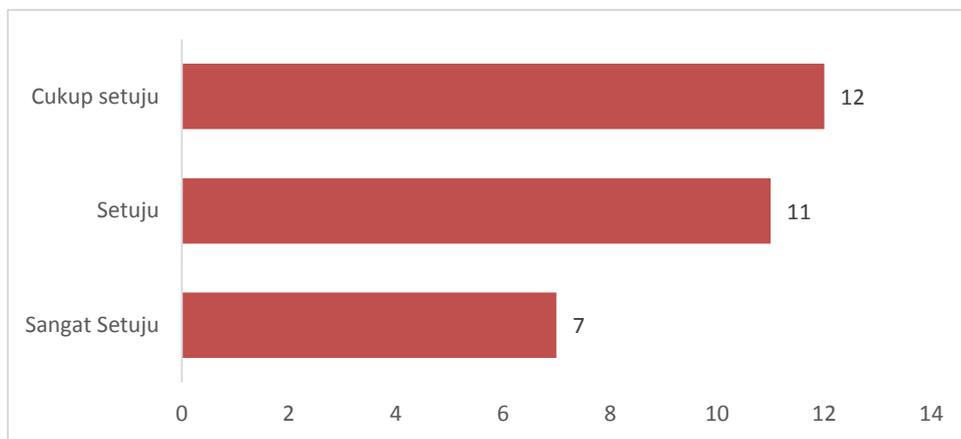
Gambar 4. 3 Responden yang membutuhkan modal usaha tambahan

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa Sebagian besar responden yaitu sebanyak 24 responden membutuhkan modal usaha tambahan dan sebanyak 6 responden tidak begitu membutuhkan modal tambahan. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM cenderung membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya.



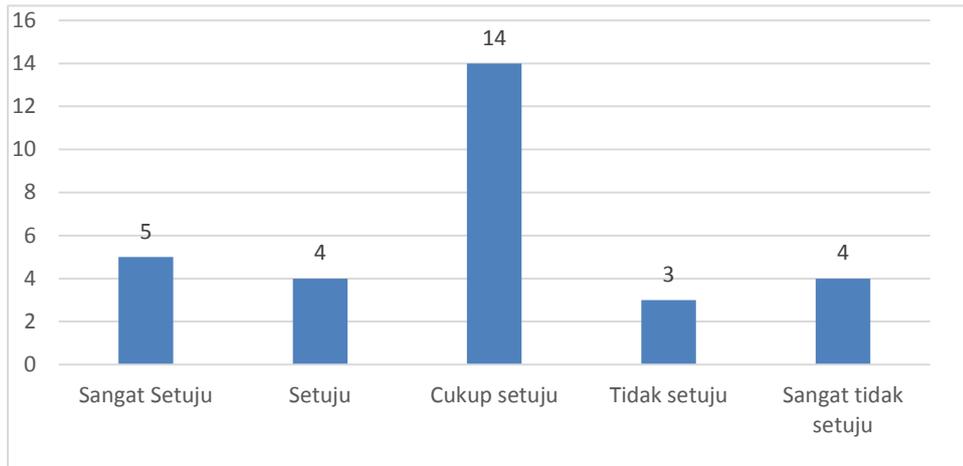
Gambar 4. 4 Jumlah responden yang memahami produk keuangan dari bank dan non bank

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa sebanyak 25 responden sangat setuju dan sebanyak 5 responden setuju. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah memiliki literasi dan wawasan mengenai produk keuangan yang disediakan berbagai pihak yang di sempitkan menjadi Lembaga bank dan non bank.



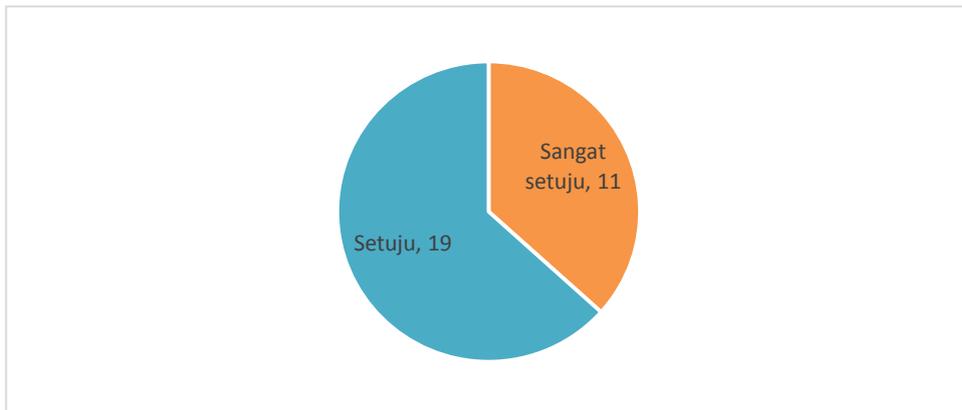
Gambar 4. 5 Responden yang memahami alur administrasi pinjaman modal usaha dari bank

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa yaitu sebanyak 12 responden menjawab cukup setuju dan sebanyak 11 responden menjawab setuju kemudian 7 responden menjawab sangat setuju Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM cenderung memahami alur administrasi untuk mengajukan pinjaman modal ke bank.



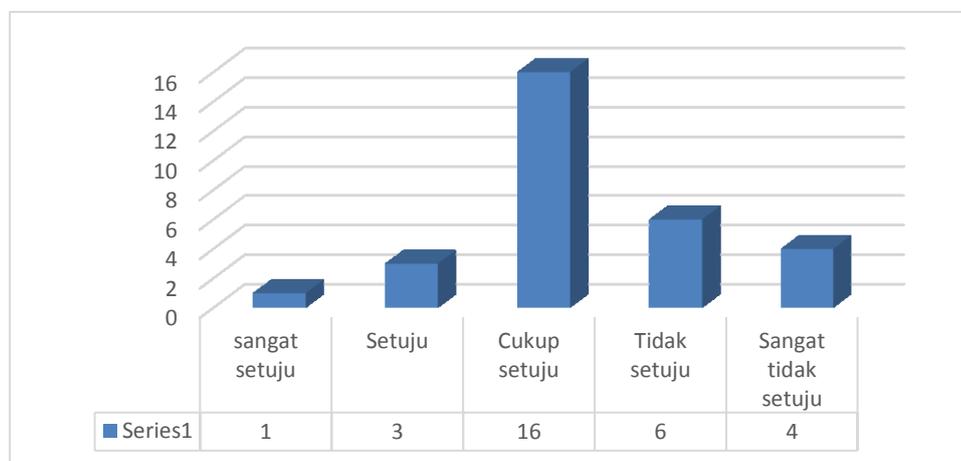
Gambar 4. 6 Responden yang memahami alur administrasi pinjaman modal dari non bank

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa yaitu sebanyak 5 responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 4 responden menjawab setuju kemudian 14 responden menjawab cukup setuju sedangkan 3 responden menjawab tidak setuju dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM cenderung kurang memahami alur administrasi untuk mengajukan pinjaman modal ke Lembaga non bank.



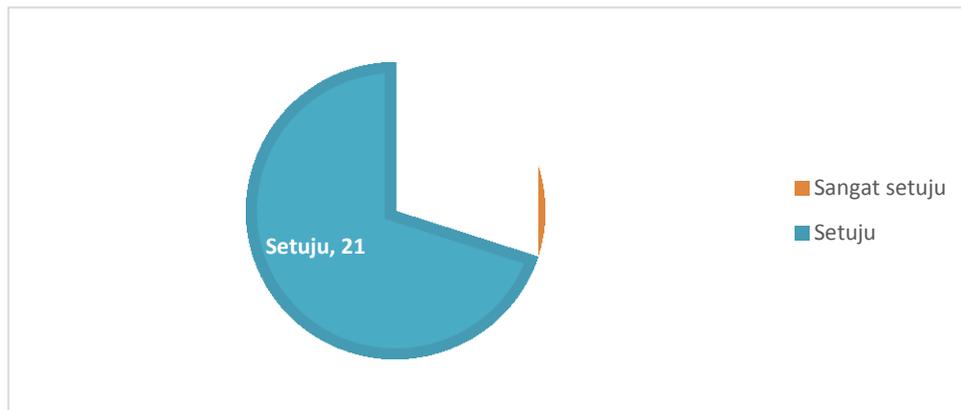
Gambar 4. 7 Responden memahami layanan produk keuangan dari lembaga Bank, Pegadaian, PNM, leasing, Pinjaman online dan lainnya

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa sebanyak 19 responden sangat setuju dan sebanyak 11 responden menjawab setuju. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah memiliki literasi dan wawasan mengenai produk keuangan yang disediakan berbagai pihak seperti Lembaga bank ,pegadaian, leasing, pinjaman online, PNM Mekar dan lainnya.



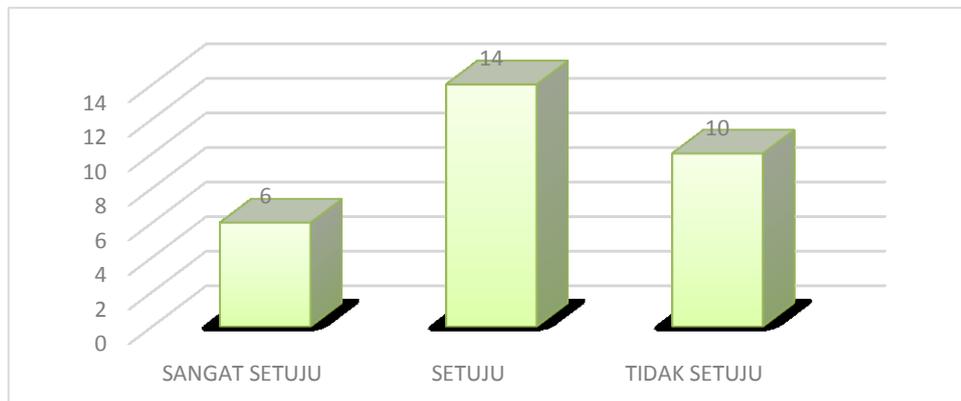
Gambar 4. 8 Responden memahami pembuatan laporan keuangan

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa yaitu sebanyak 1 responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 3 responden menjawab setuju kemudian 16 responden menjawab cukup setuju sedangkan 6 responden menjawab tidak setuju dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM cenderung kurang memahami pembuatan laporan keuangan dalam kegiatan usahanya sedangkan laporan keuangan sangat penting untuk membuat keputusan dimasa depan.



Gambar 4. 9 Responden pernah mengakses jasa produk keuangan bank atau non bank

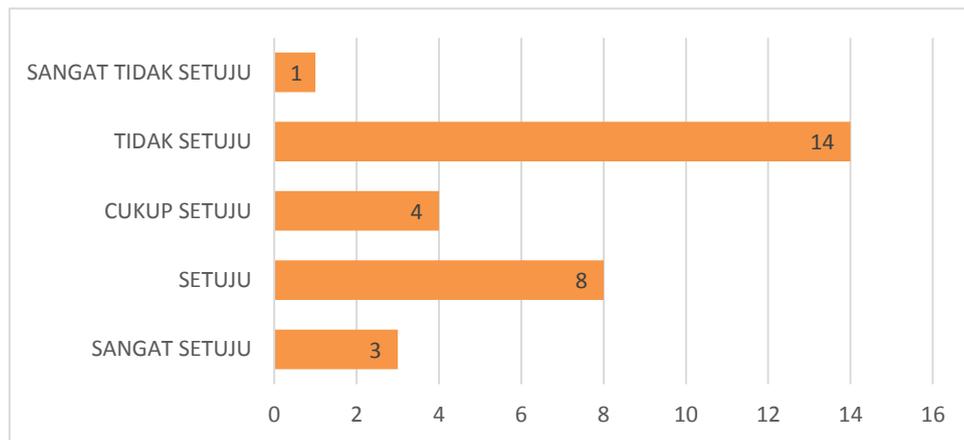
Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa sebanyak 9 responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 21 responden menjawab setuju. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sudah mengakses jasa produk keuangan yang disediakan Lembaga bank ,pegadaian, leasing, pinjaman online, PNM Mekar dan lainnya.



Gambar 4. 10 Responden pernah melakukan pinjaman modal usaha dari bank

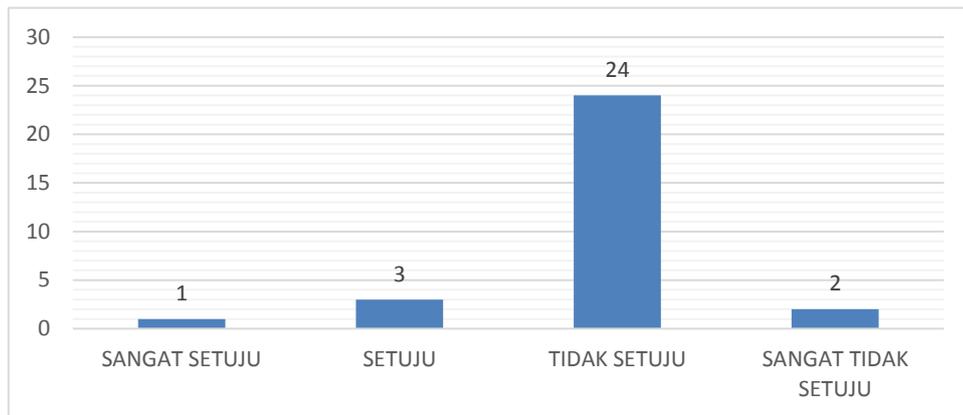
Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa yaitu sebanyak 6 responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 14 responden menjawab setuju kemudian 10 responden menjawab tidak setuju. Dari data diatas

dapat disimpulkan bahwa pelaku 30 responden yang mengetahui adanya layanan pinjaman modal ada 20 responden yang mengajukan pinjaman modal ke bank.



Gambar 4. 11 Responden mendapat perbedaan pelayanan antara pria dan wanita

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa yaitu sebanyak 3 responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 8 responden menjawab setuju kemudian 4 responden menjawab cukup setuju sedangkan 14 responden menjawab tidak setuju dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa responden cenderung mendapat perbedaan terkait gender dalam proses pengajuan pinjaman modal.



Gambar 4. 12 Responden pernah melakukan pinjaman dari lembaga non bank

Dari gambar diatas dapat dilihat hasil survey dari 30 responden bahwa sebanyak 1 responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 3 responden menjawab setuju kemudian 24 responden menjawab tidak setuju dan 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa 30 responden kurang mengakses pinjaman modal dari Lembaga non bank.

4.2.3 Pembahasan

A. Literasi Keuangan Pelaku UMKM Perempuan

Bhushan & Medury (2013) Literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Literasi keuangan merupakan kombinasi dari kemampuan individu, pengetahuan, sikap dan akhirnya perilaku individu yang berhubungan dengan uang. Literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif seperti pembayaran tagihan tepat waktu, angsuran pinjaman, tabungan sebelum habis dan menggunakan kartu kredit secara bijaksana. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM perempuan di kota Medan yang menjelaskan bahwa para pelaku UMKM sudah mengetahui tentang produk keuangan yang disediakan Lembaga keuangan beserta administrasi dan tentunya sudah memahami risiko dan manfaat yang akan diterima dari keputusan yang telah diambil. Dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang telah mengakses beberapa produk keuangan yang dibutuhkan dalam keperluan usahanya. Pada gambar 4.3 – 4.8 dapat dilihat bahwa wawasan pengetahuan responden tentang keuangan sudah tinggi terbukti dengan lebih dominan responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Contoh pada (Gambar 4.7 responden memahami layanan keuangan dari Lembaga Bank, Pegadaian, Pnm Mekar, leasing, pinjaman online dan lainnya),

dari pernyataan tersebut terdapat 19 responden yang menjawab setuju dan 11 menjawab sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM perempuan sudah memiliki literasi yang tinggi dalam keuangan.

B. Aksesibilitas Keuangan UMKM Perempuan

Seran, (2018) Untuk melihat aksesibilitas tersebut teori yang digunakan adalah teori aksesibilitas yang terdiri dari 3 dimensi yang masing-masing meliputi aspek-aspek yakni : Pertama, Kognitif meliputi kesadaran masalah, pengetahuan untuk mengatasi masalah, dan derajat kepercayaan diri. Kedua, Perilaku meliputi Kemampuan Berkomunikasi dan Pola Perilaku, dan Ketiga Birokrasi Administrasi meliputi kekakuan prosedur, pemerataan perlakuan, dan jarak sosial antar pelanggan dan petugas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebar kuesioner pada pelaku UMKM Perempuan di Kota Medan lebih banyak pelaku UMKM yang telah mengakses produk keuangan. Kemudian ditemukan terdapat perbedaan pelayanan dalam persetujuan pinjaman antara pria dan wanita. Hal ini tentunya berkaitan juga dengan status penghasilan pelaku UMKM tersebut. Dapat dilihat pada (Gambar 4.8 responden pernah mengakses layanan produk keuangan dari Lembaga bank dan non bank), terdapat 9 responden menjawab sangat setuju dan 21 responden menjawab setuju. Dapat disimpulkan bahwa 100 % responden sudah mengakses jasa layanan keuangan. Kemudian pada (Gambar 4.10 responden pernah melakukan pinjaman modal usaha dari bank), dari pernyataan tersebut didapatkan hasil 6 responden menjawab sangat setuju, 14 setuju dan 10 tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang sudah

mengakses pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Hasil itu juga membuktikan bahwa tingkat aksesibilitas keuangan UMKM perempuan Kota Medan sudah tinggi.

C. Inklusi Keuangan Pelaku UMKM Perempuan

Menurut *World Bank* (2016) inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat inklusi keuangan pelaku UMKM Perempuan di Kota Medan Sudah tinggi. Dibuktikan dengan tingginya tingkat literasi keuangan dan aksesibilitas untuk menggunakan layanan jasa dari Lembaga keuangan terkait yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perempuan di kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapakesimpulan, antara lain:

1. Literasi pelaku UMKM perempuan kota medan dalam hal wawasan dan pengetahuan tentang keuangan sudah cukup tinggi. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan banyaknya responden yang mengetahui dan memahami tentang produk-produk dan layanan yang di tawarkan oleh Lembaga keuangan bank maupun non bank.
2. Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat aksesibilitas responden terhadap produk keuangan cukup tinggi, dapat kita lihat bahwa lebih banyak responden yang mengakses dibandingkan yang belum menggunakan jasa layanan keuangan yang di tawarkan oleh Lembaga bank. Kemudian berbeda dengan Lembaga bank, terdapat lebih sedikit responden yang mengakses pinjaman modal usaha dari Lembaga non bank. Padahal Lembaga non bank seperti Pegadaian dan PNM Mekar menyediakan kredit/pinjaman untuk UMKM. Dalam proses pelayanan juga terdapat perbedaan perlakuan pelayanan antara perempuan dan pria yang cukup tinggi dalam pengajuan kredit modal usaha oleh bank maupun non bank.
3. Tingkat inklusi keuangan khususnya pelaku UMKM perempuan dikota medan cukup baik karena masyarakat sudah memiliki literasi dan

kemudahan untuk mengakses dengan banyaknya produk maupun Lembaga yang menawarkan jasa keuangan yang dapat digunakan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

5.2 Saran

1. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan masih kurang maksimal, diharapkan pemerintah dan pelaku UMKM sendiri meningkatkan sosialisasi maupun belajar mandiri tentang pengelolaan keuangan dalam usahanya.
2. Pemerintah dan pihak penyedia layanan keuangan harus lebih sinkron dan memberikan kemudahan administrasi guna manfaatnya dapat dirasakan oleh pengusaha di level UMKM sehingga tercipta system keuangan inklusif.
3. Pendataan terhadap pelaku UMKM masih kurang terakomodir sehingga menyulitkan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Padahal data sangat penting untuk penelitian maupun untuk program pemerintah dan kepentingan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- ADBI-Institute. 2014. Financial Inclusion In Asia :Country Surveys. Asian Development Bank Institute Www.Adbi.Org Diakses Pada 23 November 2017
- Akmal, H., & Saputra, Y. E. K. A. (2014). Analisis Tingkat Literasi Keuangan.
- Allen, Franklin, Demircuc-Kunt, A., L., Klapper, Maria Soledad Martinez Peria. 2016. The Foundation of Financial Inclusion; Understanding Ownership And Use Of Formal Account. Journal Financial Intermediation, Vol. 27 : 1-30.
- Anggraeni, B. D. (2015). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pemilik Usaha. Jurnal Vokasi Indonesia, 3(2), 109–121.
- Arianti, B. F. (2022). Literasi Keuangan (Teori dan Implementasinya).
- Bank Indonesia. 2019. Indikator Keuangan Inklusi. <https://www.bi.go.id/>. Diakses Pada Juni 2020
- Booklet Keuangan Inklusif. Departemen Pengembangan Akses Keuangan Dan Umkm. www.bi.go.id Diakses Pada 15 Agustus 2017
- Fahmy, O.M., Rustam, M. Dan Asmayadi, E. 2016. Pengaruh Keuangan Inklusi Terhadap Kredit Yang Disalurkan Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia, 5: 118-135.
- Fitriana, W., Rustiadi. E., Fauzi, A. Dan Anggraeni, L. 2018. Penguatan Inklusi Keuangan Pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil Di Sumatra Barat. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 140–153.
- Hayati, Deni Sri Dkk. 2014. Analisis Inflasi Pra Dan Pasca Krisis Moneter Dalam Perekonomian Indonesia (Daring). Tautan: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3848/3478>
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/pages/sp_2412322.aspx
- <https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/read/29/3009/snki-perempuan-solusi-pemulihan-keuangan-perempuan-pasca-pandemi>
- Hafni, R., & Rozali, A. (2015). *analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra.

Hafni, Roswita, Prawidya Hariani RS, and Dara Rezeki. "Aksesibilitas Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22.2 (2022): 158-167.

Seran, C. R. W. (2018). Kebijakan Inklusivitas Keuangan: Aksesibilitas Masyarakat terhadap Layanan Keuangan untuk Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

Www.Elsevier.Com/Locate/Jfi Diakses Pada 18 Oktober 2017 Bank Indonesia.2014.